



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

RABU, 11 JULI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Serapan APBD Rendah

KEPAHIANG, BE - Memasuki triwulan ketiga di tahun 2018, serapan dana APBD Kabupaten Kepahiang masih sangat rendah. Dampaknya, laju pembangunan berjalan lambat. Karena banyak program kegiatan pembangunan belum dilaksanakan hingga di bulan Juli ini.

Wakil Ketua I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra SE menegaskan, salah satu penyebab belum terserap Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber APBD Kepahiang. Sehingga di semester pertama geliat pembangunan menjadi sepi, akibat banyak program yang belum berjalan.

"DAU 2018 sebesar Rp 50 miliar, sebesar Rp 35 miliar ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan itu belum terserap," tegas Aan.

Menurutnya, melalui Komisi III pihaknya akan memanggil DPU untuk mendapatkan keterangan belum terpakainya DAU di lembaga yang dipimpin oleh Ismail Hakim tersebut. "Terkait hal ini, Komisi III akan memanggil OPD terkait, kita khawatir nanti gagal lelang," ungkapnya.

Aan mengkritisi, kinerja jajaran Pemkab Kepahiang, sebab lambannya penyerapan anggaran menunjukkan lemahnya perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Keadaan itu menimbulkan kekhawatiran legislatif program pembangunan tak berjalan dengan baik, mengingat masa anggaran terus berjalan. Sedangkan keterlambatan realisasi pekerjaan fisik sudah terlalu jauh ditambahkan

dengan kondisi alam yang mendekati musim hujan sangat ditakutkan mengganggu realisasi pekerjaan fisik.

"Kita akan segera panggil," tegasnya.

Anggaran DAU sendiri digunakan untuk pembangunan gedung, jalan lingkungan, irigasi dan pembangunan fisik lainnya yang dipusatkan penggarannya di Dinas Pekerjaan Umum.

Kadis PU Kepahiang, Ismail Hakim dikonfirmasi BE mengatakan, jika berkas pengajual lelang sudah disampaikan ke ULP dan tengah berlangsung prosesnya.

"Sebagian sudah masuk di ULP masih bulan puasa kemarin, sekarang masih verifikasi dan kaji ulang di ULP untuk kelengkapan berkas," tegas Ismail. (320)